

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Teori.....	19
2.1.1 Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang PPh	19
2.1.2 Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang PPh	22
2.1.3 Timbulnya Utang Pajak Undang-Undang PPSP.....	23
2.2 Tinjauan Konseptual	26
2.2.1 Konsep <i>Transfer Pricing</i>	26
2.2.2 <i>Specific Anti-Avoidance Rules</i> dan <i>General Anti-Avoidance Rules</i>	27
2.2.3 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	28
2.2.4 Metode Pendekatan <i>Transfer Pricing</i> dalam Menentukan Harga Wajar	
31	
2.2.5 Hubungan Istimewa.....	39

2.2.6	Sengketa Pajak.....	43
2.2.7	Penyelesaian Sengketa.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Jenis Penelitian	50
3.2	Jenis Data.....	52
3.3	Cara Perolehan Data.....	55
3.4	Jenis Pendekatan.....	56
3.5	Analisa Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		60
4.1	Hasil Penelitian.....	60
4.1.1	Kronologi Kasus.....	60
4.1.1.1	Tingkat Keberatan.....	60
4.1.1.2	Tingkat Banding.....	61
4.1.1.3	Tingkat Peninjauan Kembali.....	63
4.2	Penerapan Metode <i>Transfer Pricing</i> dalam Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.....	65
4.2.1	Pemenuhan Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	65
4.2.2	Tantangan PKKU dalam <i>Transfer Pricing</i>	66
4.2.3	Metode Penentuan Harga Wajar dalam <i>Transfer Pricing</i>	72
4.2.3.2	Penggunaan Metode <i>Cost Plus</i>	77
4.2.3.3	Penggunaan <i>Resale Price Method</i>	81
4.2.3.4	Penentuan Harga Transfer oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	85
4.3	Penerapan Aspek Hubungan Istimewa dalam Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	89
4.3.1	Hubungan Istimewa dalam Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.....	89
4.3.2	Perbandingan Konsep Hubungan Istimewa di Indonesia dan Vietnam.....	95
4.3.3	Dampak Transaksi Hubungan Istimewa dan Skema <i>Transfer Pricing</i>	105
4.3.4	Pembuktian Hubungan Istimewa.....	110
4.3.5	Hubungan Istimewa dalam Kerangka SAAR dan GAAR.....	112
4.3.6	Hubungan Istimewa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/B/PK/PJK/2016.....	117

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbandingan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri	21
Tabel IV.1 Perbandingan Penerapan Cost Plus Method dan Resale Price Method.	75
Tabel IV.2 Perbandingan Kinerja Laba Penjualan Domestik dan Ekspor TMMIN (Dalam Jutaan Rupiah).....	80
Tabel IV.3 Perbandingan Sistem Perpajakan Vietnam dan Indonesia.....	96
Tabel IV.4 Perbandingan Pengaturan Hubungan Istimewa di Vietnam dan Indonesia	97
Tabel IV.5 Laporan Laba Rugi A Corp.....	108
Tabel IV.6 Laporan Laba Rugi B Corp	108
Tabel IV.7 Laporan Laba Rugi Konsolidasi (A Corp dan B Corp)	108
Tabel IV.8 Perbandingan Laporan Laba Rugi Konsolidasi dengan dan tanpa <i>Transfer Pricing</i>	108
Tabel IV.9 Ketentuan GAAR dan SAAR dalam Undang-Undang PPh	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia	47
Gambar IV.1 Skema <i>Transfer Pricing</i> pada Pihak dengan Hubungan Istimewa	107
Gambar IV.2 Transaksi pada Toyota Motor Manufacturing Indonesia	110

